

Penguatan *One China Policy* Melalui Kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) Sebagai *Soft Power* di Indonesia

Ni Luh Yunita Ekanintan Deana Putri¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini membahas penguatan *One China Policy* (OCP) di Indonesia melalui kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai instrumen *soft power* Tiongkok. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis bagaimana BRI tidak hanya berperan sebagai proyek pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana diplomasi publik untuk membangun pengaruh politik dan kultural Tiongkok di Indonesia. Studi ini memetakan berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur (KCIC), otomotif dan teknologi (BYD, Huawei, TikTok), pendidikan dan beasiswa, diplomasi kesehatan, serta peran aktor negara dan non-negara dalam memperkuat penerimaan OCP di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui proyek-proyek besar dan kerja sama multidimensi, Tiongkok berhasil membangun citra positif, menciptakan ketergantungan ekonomi dan teknologi, serta memengaruhi sikap diplomatik Indonesia terhadap isu Taiwan.

Kata-kunci : *Belt and Road Initiative*, Indonesia, *One China Policy*, *Soft Power*, Tiongkok

Abstract

This study examines the strengthening of the One China Policy (OCP) in Indonesia through the Belt and Road Initiative (BRI) as an instrument of China's soft power. Using a qualitative approach and literature review method, this research analyzes how BRI serves not only as an economic development project but also as a tool of public diplomacy to build China's political and cultural influence in Indonesia. The study maps key strategic sectors, including infrastructure (KCIC), automotive and technology (BYD, Huawei, TikTok), education and scholarships, health diplomacy, as well as the role of state and non-state actors in reinforcing OCP acceptance in Indonesia. The findings reveal that through major projects and multidimensional cooperation, China has successfully built a positive image, created economic and technological dependence, and influenced Indonesia's diplomatic stance on the Taiwan issue.

Keywords : *Belt and Road Initiative*, China, Indonesia, *One China Policy*, *Soft Power*

Kontak Penulis

Ni Luh Yunita Ekanintan Deana Putri

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. PB Sudirman, Denpasar-Bali, 80234

Telp: +62-878-0347-7254 Fax: +62-878-0347-7254

E-mail : yunitaddea@gmail.com

PENDAHULUAN

Hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki akar historis yang panjang, dimulai dari perdagangan maritim, migrasi komunitas Tionghoa ke Nusantara, hingga akulturasi budaya yang meninggalkan jejak dalam kuliner, arsitektur, hingga tradisi sosial (Suryadinata, 2017). Meski demikian, hubungan kedua negara sempat memburuk pasca peristiwa G30S/PKI 1965 yang dituding melibatkan Tiongkok, sehingga hubungan diplomatik terputus pada 1967 dan baru dinormalisasi kembali pada 1990 melalui pendekatan pragmatis (Leong, 2017). Sejak itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya pada prinsip *One China Policy* (OCP), tetapi tetap membuka ruang kerja sama ekonomi dengan Taiwan melalui *Taipei Economic and Trade Office* (TETO), dengan total perdagangan bilateral Indonesia-Taiwan mencapai USD 10,8 miliar pada 2012 (TAITRA, 2013). Kondisi ini dipandang Tiongkok sebagai faktor yang berpotensi melemahkan posisi OCP secara simbolik, sehingga diperlukan pendekatan baru untuk memperkuatnya di negara mitra.

Sebagai respons, Tiongkok meluncurkan *Belt and Road Initiative* (BRI) pada 2013 yang diklaim sebagai program pembangunan ekonomi global, namun juga dipandang banyak analis sebagai instrumen *soft power* untuk memperluas pengaruh politik dan ideologis (Nye, 2004; An & Wang, 2020). BRI berupaya menciptakan keterhubungan ekonomi dan interdependensi melalui proyek besar, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi, yang pada akhirnya dapat menyelaraskan kebijakan negara mitra dengan kepentingan inti Tiongkok, termasuk OCP (Chen, 2021). Indonesia menjadi negara penting dalam skema ini karena posisinya di jalur *Maritim Silk Road* dan kapasitasnya sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 25 proyek BRI bernilai lebih dari USD 30 miliar (Bappenas, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama yakni bagaimana Tiongkok memanfaatkan *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai strategi *soft power* untuk memperkuat *One China Policy* (OCP) di Indonesia. Rumusan ini menjadi landasan analisis dalam mengkaji peran proyek-proyek BRI, baik di sektor infrastruktur maupun non-infrastruktur, sebagai instrumen pengaruh non-koersif yang membentuk persepsi publik, sikap pemerintah, dan arah diplomasi Indonesia terhadap isu Taiwan.

Kajian mengenai strategi kebangkitan Tiongkok banyak dibahas oleh para akademisi dalam berbagai perspektif. Pillsbury (2015) melalui bukunya *The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower* menjelaskan bagaimana Tiongkok memiliki strategi jangka panjang untuk menggantikan dominasi Amerika Serikat, dengan menggunakan instrumen diplomasi, ekonomi, hingga budaya. Hal ini sejalan dengan teori *soft power* Joseph Nye (2004), yang menyatakan bahwa daya tarik suatu negara dapat dibangun melalui nilai, budaya, serta kebijakan luar negeri yang meyakinkan. Dalam konteks ini, *Belt and Road Initiative* (BRI) dapat dipahami sebagai salah satu instrumen utama untuk menyalurkan pengaruh tersebut secara sistematis.

Kajian empiris juga menegaskan peran BRI dalam memperluas pengaruh Tiongkok. An dan Wang (2020) dalam artikelnya *The Impact of the Belt and Road Initiative on Chinese International Political Influence: An Empirical Study Using a Difference-in-Differences Approach* menunjukkan bahwa BRI berkontribusi signifikan pada peningkatan pengaruh politik Tiongkok melalui mekanisme interdependensi ekonomi negara mitra. Sementara itu, Leong (2017) melalui artikelnya *The One China Policy and Its Implication for China's Relations with Southeast Asia* menekankan bahwa OCP merupakan

kepentingan inti Tiongkok yang harus dijaga konsistensinya di kawasan, sehingga kerja sama dalam kerangka BRI dapat dilihat sebagai strategi untuk memperkuat legitimasi OCP di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, literatur yang ada menegaskan bahwa BRI bukan hanya proyek pembangunan ekonomi, tetapi juga instrumen *soft power* yang strategis untuk memperluas pengaruh diplomatik dan politik Tiongkok.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tiongkok memanfaatkan *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai strategi *soft power* dalam memperkuat implementasi *One China Policy* (OCP) di Indonesia dengan mengidentifikasi bentuk pengaruh non-koersif melalui sektor strategis seperti infrastruktur, otomotif, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi perubahan simbolik dan diplomatik dalam kebijakan luar negeri Indonesia sejak peluncuran BRI pada 2013, serta menggambarkan korelasi antara perluasan pengaruh ekonomi Tiongkok dengan sikap Indonesia yang lebih akomodatif terhadap OCP, khususnya terkait isu Taiwan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi studi hubungan internasional dalam memahami bagaimana kekuatan ekonomi dapat digunakan sebagai instrumen pengaruh diplomatik melalui pendekatan *soft power* yang terstruktur dan strategis..

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena dan menganalisis makna dari data yang diperoleh secara mendalam. Menurut Creswell (dalam Murdiyanto, 2020), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui deskripsi naratif, sementara Waruwu

(2023) menekankan bahwa metode ini menekankan kualitas, konteks, dan interpretasi. Dengan demikian, penelitian ini menelaah bagaimana Tiongkok memanfaatkan *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai instrumen *soft power* untuk memperkuat *One China Policy* (OCP) di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbatas dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, laporan resmi pemerintah, dokumen perjanjian bilateral Indonesia–Tiongkok, serta publikasi lembaga internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan topik, khususnya terkait BRI, OCP, dan hubungan Indonesia–Tiongkok.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (2002) yang mencakup tiga tahap, yaitu: (1) pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya terkait BRI dan OCP; (2) reduksi data dengan menyaring informasi relevan; dan (3) interpretasi data untuk menyusun jawaban atas rumusan masalah penelitian. Tahapan ini menghasilkan analisis komprehensif mengenai bagaimana BRI menjadi instrumen *soft power* Tiongkok dalam memengaruhi kebijakan dan sikap Indonesia terhadap OCP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah terjalin melalui proses panjang yang melibatkan pertukaran sosial, budaya, dan nilai strategis, bukan sekadar melalui diplomasi formal. Dalam dinamika global yang semakin kompleks, kerja sama kedua negara kini mencakup infrastruktur, pendidikan, teknologi, hingga budaya populer. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari aspek militer dan ekonomi, tetapi

juga dari kemampuannya membangun persepsi dan kepercayaan melalui pendekatan *soft power* (Nye, 2004). Sejak 2013, *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi instrumen utama Tiongkok untuk memperluas pengaruh jangka panjang di Indonesia, tidak hanya lewat proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tetapi juga melalui ekspansi perusahaan teknologi, program beasiswa, dan pendirian *Confucius Institute* (Zhang, 2021; Suryadinata, 2025).

Penelitian ini menganalisis bagaimana BRI digunakan sebagai strategi *soft power* Tiongkok untuk memperkuat *One China Policy* (OCP) di Indonesia. Pengaruh tersebut tidak dilakukan secara koersif, melainkan melalui kerja sama ekonomi, pendidikan, budaya digital, dan diplomasi kesehatan yang membentuk penerimaan terhadap posisi Tiongkok dalam isu Taiwan (Melissen, 2005; Haid & Zhang, 2022). Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada dinamika hubungan Indonesia–Tiongkok, aktualisasi OCP di Indonesia, persepsi Tiongkok terhadap hubungan Indonesia–Taiwan, serta implementasi teori *soft power* Joseph Nye dalam konteks BRI di Indonesia.

Ikatan Historis antara Indonesia dan Tiongkok

Hubungan Indonesia dan Tiongkok berakar sejak abad ke-7 melalui perdagangan maritim, migrasi, dan pembentukan komunitas Tionghoa di wilayah pesisir Nusantara. Komunitas ini, terutama dari Fujian dan Guangdong, berasimilasi dengan budaya lokal hingga melahirkan identitas Tionghoa-Peranakan yang tercermin dalam kuliner, bahasa, dan tradisi sosial (Suryadinata, 2017; Coppel, 2002). Meski mengalami diskriminasi di era Orde Baru, pengakuan kembali agama Konghucu pada tahun 2000 menjadi titik balik penerimaan identitas Tionghoa dalam ruang publik, memperkuat multikulturalisme Indonesia, sekaligus memberi ruang bagi Tiongkok

membangun citra sebagai mitra yang memiliki ikatan historis dengan bangsa Indonesia.

Kedekatan tersebut kemudian diperluas melalui pendidikan, budaya, kesehatan, dan teknologi. Hingga 2023 terdapat lebih dari 9 pusat studi Tiongkok dan program *Confucius Institute* yang aktif di universitas-universitas Indonesia (Xinhua, 2023), sementara media digital seperti TikTok dengan 125 juta pengguna di Indonesia menjadi sarana penyebaran budaya populer (DataReportal, 2024). Selama pandemi COVID-19, Tiongkok juga berperan besar dengan menyalurkan lebih dari 215 juta dosis vaksin dan memperkenalkan pengobatan tradisional Tiongkok (Xinhua, 2021). Di bidang pendidikan, ribuan beasiswa dan program kerja sama akademik memperkuat pengaruh jangka panjang Tiongkok (Haid & Zhang, 2022). Kehadiran Tiongkok di berbagai sektor ini membentuk ekosistem sosial yang menumbuhkan citra positif dan memperkuat legitimasi diplomasi, termasuk penerimaan terhadap prinsip *One China Policy*.

Aktualisasi Kebijakan *One China Policy* (OCP) di Indonesia

One China Policy (OCP) merupakan prinsip utama kebijakan luar negeri Tiongkok yang menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari kedaulatan Tiongkok, dan menjadi syarat dasar negara lain menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing (Sutter, 2018; Zhang, 2021). Indonesia telah mengakui OCP sejak 1950, menjadikannya salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, dan hingga kini konsisten tidak membuka hubungan formal dengan Taiwan, meskipun tetap menjalin interaksi ekonomi melalui *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) (Antara News, 2025; Suryadinata, 2025). Sejak peluncuran *Belt and Road Initiative* (BRI) pada 2013, Tiongkok mengaktualisasikan OCP di Indonesia bukan

melalui tekanan, melainkan lewat kerja sama infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung, ekspansi perusahaan teknologi seperti Huawei dan BYD, serta sektor pendidikan melalui beasiswa dan pendirian *Confucius Institute* (Zhang, 2021; Xinhua, 2023).

Pengaruh Tiongkok juga tampak di ruang budaya dan digital, misalnya lewat festival budaya, pertukaran pelajar, serta platform TikTok yang digunakan lebih dari 125 juta pengguna di Indonesia, termasuk UMKM sebagai sarana pemasaran (DataReportal, 2024; Annur, 2024; Katadata, 2024). Kehadiran ini membangun citra Tiongkok sebagai mitra ramah dan relevan, sekaligus memperkuat persepsi positif di kalangan generasi muda. Dampak diplomatiknya terlihat dari sikap Indonesia yang semakin menyesuaikan diri dengan sensitivitas Beijing, misalnya penolakan partisipasi Taiwan dalam IIDSS 2017 dan pembatasan aktivitas simbolik TETO sejak 2021 (Taiwan News, 2021; Suryadinata, 2025).

Keterlibatan Indonesia dalam proyek BRI serta interaksi budaya tersebut mencerminkan efektivitas *soft power* Tiongkok sebagaimana dikemukakan Joseph Nye (2004), yakni membangun daya tarik melalui kerja sama yang menguntungkan tanpa paksaan. Hasilnya, Indonesia lebih akomodatif terhadap OCP, sementara masyarakat merasakan pengaruh Tiongkok bukan sebagai tekanan politik, melainkan lewat pendidikan, teknologi, dan budaya populer yang hadir dalam kehidupan sehari-hari (Melissen, 2005; Haid & Zhang, 2022).

Persepsi Tiongkok terhadap Dinamika Diplomatik antara Indonesia dan Taiwan

One China Policy (OCP) merupakan prinsip utama Tiongkok yang menegaskan Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan nasional, sehingga konsistensi dukungan negara mitra menjadi krusial (Sutter, 2018). Indonesia telah

mengakui OCP sejak 1950 dan tidak membuka hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, meskipun tetap menjalin kerja sama ekonomi melalui TETO. Perubahan sikap Indonesia terhadap Taiwan dalam dua dekade terakhir bukan hasil tekanan langsung, melainkan pendekatan struktural Tiongkok melalui BRI (2013) yang menciptakan ketergantungan jangka panjang di bidang infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan (Zhang, 2021; Suryadinata, 2025).

Sebelum BRI, hubungan Indonesia–Taiwan cukup signifikan, terutama perdagangan (USD 10,8 miliar pada 2012), investasi, tenaga kerja migran (250.000 pekerja), serta pendidikan melalui beasiswa Taiwan (TAITRA, 2013; IOM, 2020). Namun sejak BRI, hubungan Indonesia lebih condong ke Tiongkok, tercermin dalam proyek KCIC, ekspansi Huawei, dan penyebaran *Confucius Institute*. Dampaknya, interaksi dengan Taiwan tetap ada tapi terbatas, sementara ruang diplomatiknya menyusut, termasuk pembatasan aktivitas TETO sejak 2021 (Taiwan News, 2021).

Langkah Indonesia terlihat jelas pada IIDSS 2017 dengan menolak delegasi Taiwan, hingga pernyataan tegas Menlu Sugiono pada April 2025 bahwa isu Taiwan adalah urusan domestik Tiongkok (Storey, 2017; Antara News, 2025). Hal ini menandakan Indonesia semakin menyesuaikan sikap dengan sensitivitas Beijing tanpa mengubah posisi hukumnya, sejalan dengan konsep *soft power* Nye (2004), di mana pengaruh diperoleh melalui daya tarik kerja sama, bukan paksaan.

Implementasi *Belt and Road Initiatives* (BRI) sebagai *Soft Power* di Indonesia

Belt and Road Initiative (BRI), diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013, adalah strategi global yang menghubungkan Tiongkok dengan lebih dari 140 negara melalui jalur darat (*Silk Road Economic Belt*) dan laut (*21st Century*

Maritime Silk Road), termasuk Indonesia (Kemlu RRT, 2023). Secara resmi digambarkan sebagai kerja sama ekonomi berbasis *win-win cooperation*, BRI sejatinya berfungsi sebagai instrumen *soft power* Tiongkok untuk membangun ketergantungan struktural, memperluas pengaruh simbolik dan diplomatik, serta memperkuat isu sensitif seperti *One China Policy* (An & Wang, 2020; Li, 2009; Nye, 2004).

Di Indonesia, proyek seperti KCIC Jakarta–Bandung, kawasan industri Morowali, dan ekspansi Huawei, Wuling, serta DFSK memperlihatkan bagaimana kerja sama ekonomi menciptakan ketergantungan pada investasi dan teknologi Tiongkok (Bappenas, 2021). Selain itu, program beasiswa, pendirian *Confucius Institute*, hingga platform digital seperti TikTok memperkuat citra Tiongkok sebagai kekuatan budaya dan teknologi global (Zhang, 2021). Melalui diplomasi halus, termasuk bantuan kesehatan saat COVID-19 dan forum regional, BRI berhasil mendorong Indonesia untuk lebih akomodatif terhadap *One China Policy*, seperti ditunjukkan melalui pembatasan aktivitas TETO dan pernyataan resmi Kemlu RI (Kemlu RI, 2021).

Dengan demikian, BRI di Indonesia tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagian dari transformasi kekuatan simbolik Tiongkok. Hal ini selaras dengan teori Nye bahwa kekuatan paling efektif adalah *power with others* ketimbang *power over others* (Nye, 2004), yang dalam praktiknya menjadikan BRI instrumen *soft power* strategis untuk memperkuat legitimasi Tiongkok di mata dunia.

Analisis Sektor-Sektor Strategis BRI di Indonesia

Kereta Cepat Jakarta–Bandung (*Whoosh*) merupakan proyek unggulan BRI di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga simbol kerja sama strategis Indonesia–Tiongkok dalam

aspek teknologi, diplomasi, dan simbolik (Zhang, 2021; Suryadinata, 2025). Dengan investasi sekitar USD 6 miliar yang mayoritas didanai *China Development Bank*, proyek ini dijalankan melalui konsorsium PT KCIC yang melibatkan BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok. Sejak peresmian pada Oktober 2023, *Whoosh* telah digunakan lebih dari 10 juta penumpang hingga Mei 2025, dengan rata-rata okupansi harian mencapai 25.000 orang (Kompas, 2025; Antara, 2025).

Capaian ini mencerminkan penerimaan publik yang tinggi dan memperkuat citra Tiongkok sebagai mitra modernisasi Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Penumpang Setiap Tahun

Sumber: kcic.co.id

Meski demikian, proyek *Whoosh* masih menanggung kerugian finansial besar dan memunculkan kekhawatiran potensi *debt trap*. Namun, hal ini tidak mengurangi fungsinya sebagai instrumen *soft power*, karena pengaruh Tiongkok tidak diukur dari keuntungan ekonomi, melainkan daya tarik, reputasi, dan persepsi positif yang berhasil dibangun (Nye, 2004). Proyek ini menegaskan kapabilitas teknologi tinggi Tiongkok, meningkatkan visibilitas diplomatiknya di Indonesia, serta menciptakan ketergantungan struktural melalui infrastruktur. Dengan demikian, *Whoosh* menjadi contoh nyata bagaimana BRI digunakan Tiongkok sebagai alat diplomasi simbolik untuk memperkuat pengaruh politik, termasuk dalam penguatan *One China Policy* di Indonesia (Chen, 2021).

Ekspansi teknologi dan otomotif Tiongkok di Indonesia menjadi bukti nyata efektivitas *soft*

power melalui kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Tidak hanya terbatas pada infrastruktur, Tiongkok memperkuat posisinya di sektor kendaraan listrik, komunikasi digital, hingga platform media sosial. Langkah ini tidak semata-mata mengejar keuntungan komersial, tetapi membentuk ketergantungan teknologi sekaligus persepsi publik yang positif, sejalan dengan konsep *soft power* Joseph Nye (2004) yang menekankan pengaruh melalui daya tarik dan narasi. Di sektor otomotif, merek BYD berhasil menjadi pemimpin pasar kendaraan listrik Indonesia pada 2024 dengan penjualan lebih dari 15.429 unit dan pangsa pasar 36%, melampaui dominasi Jepang dan Korea Selatan (Katadata, 2024).

Penetrasi teknologi Tiongkok di Indonesia terlihat jelas melalui kerja sama infrastruktur digital, khususnya dengan Huawei

Gambar 1. 10 Mobil listrik terlaris di Indonesia. Sumber: data.goodstats.id

Technologies. Sejak awal 2000-an, Huawei berperan penting dalam pengembangan jaringan 4G dan 5G, penyediaan BTS, serta pembangunan pusat data bersama operator nasional. Melalui program *Seeds for the Future*, lebih dari 5.000 mahasiswa dan profesional muda Indonesia telah mendapat pelatihan hingga 2024 (Huawei Indonesia, 2024). Meski mempercepat transformasi digital, dominasi Huawei menciptakan ketergantungan pada standar teknologi Tiongkok dan memunculkan

kekhawatiran terkait keamanan siber serta kontrol data.

Penetrasi *soft power* Tiongkok melalui kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia tampak jelas dalam sektor teknologi, digital, pendidikan, budaya, dan kesehatan. TikTok, misalnya, telah menjadi aplikasi media sosial terbesar di Indonesia dengan lebih dari 125 juta pengguna aktif, menempatkan Indonesia sebagai pasar global terbesar kedua setelah Tiongkok (DataReportal, 2024).

Peran TikTok melampaui sekadar hiburan, melainkan juga menjadi ruang penting dalam

Gambar 2. 10 Aplikasi terbanyak diunduh di Indonesia. Sumber: data.goodstats.id

politik, pendidikan, dan bisnis, terutama bagi pelaku UMKM. Hal ini menjadikan TikTok bukan sekadar produk teknologi, melainkan instrumen *soft power* yang membentuk gaya hidup, perilaku digital, dan narasi publik masyarakat Indonesia sesuai dengan teori Joseph Nye (2004), di mana pengaruh tercipta melalui daya tarik dan legitimasi.

Dalam bidang pendidikan, Tiongkok memperkuat pengaruhnya melalui pemberian ribuan beasiswa, pertukaran pelajar, serta pendirian delapan *Confucius Institutes* di berbagai universitas Indonesia (SCIO, 2025). Program-program seperti *Chinese Government Scholarship* maupun inisiatif khusus seperti

“Santri untuk Perdamaian Dunia” menunjukkan bahwa pendidikan dijadikan instrumen strategis untuk membangun kedekatan simbolik dan ideologis. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Tiongkok—lebih dari 15.000 hingga 2020 (ANTARA, 2020)—elite intelektual yang lahir dari pengalaman ini berpotensi menjadi agen diplomasi kultural yang mendukung narasi Tiongkok, termasuk dalam isu sensitif seperti *One China Policy* (Haid & Zhang, 2022). Kehadiran Confucius Institute yang semula berdiri sebelum BRI, kini diintegrasikan sebagai bagian dari *people-to-people connectivity*, sehingga memperluas legitimasi Tiongkok melalui pendidikan dan budaya.

Sektor kesehatan juga menjadi bagian integral dari strategi soft power Tiongkok. Pada masa pandemi COVID-19, lebih dari 80% vaksin yang digunakan di Indonesia berasal dari *Sinovac* dan *Sinopharm*, menjadikan Tiongkok pemasok utama vaksin di Indonesia (Reuters, 2021). Bantuan vaksin, alat kesehatan, hingga promosi *Traditional Chinese Medicine* (TCM) seperti akupunktur dan herbal memperkuat citra Tiongkok sebagai mitra solidaritas global yang responsif dalam krisis kesehatan (China Daily, 2022). Survei publik menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap bantuan Tiongkok, yang membangun persepsi positif bahwa Tiongkok bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga pelindung kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, BRI berfungsi lebih dari sekadar program pembangunan ekonomi. Proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung, ekspansi teknologi Huawei dan BYD, penetrasi budaya digital melalui TikTok, serta diplomasi pendidikan dan kesehatan, menunjukkan bagaimana Tiongkok membangun ketergantungan jangka panjang di berbagai sektor. Mekanisme ini sesuai dengan teori *soft power* Joseph Nye (2004) bahwa

pengaruh tercipta melalui daya tarik, nilai, dan manfaat bersama, bukan melalui paksaan. Dengan cara ini, BRI menjadi instrumen strategis yang memperkuat citra Tiongkok di Indonesia sekaligus mendorong penerimaan implisit terhadap prinsip *One China Policy*.

Aktor dan Mekanisme dalam Penguatan OCP melalui BRI sebagai *Soft Power*

Penguatan prinsip *One China Policy* (OCP) dalam hubungan Indonesia–Tiongkok tidak hanya ditentukan oleh relasi antar pemerintah, tetapi juga lahir dari kerja sistemik berbagai aktor negara maupun non-negara dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Strategi *soft power* Tiongkok berjalan non-koersif melalui interaksi ekonomi, budaya, teknologi, pendidikan, hingga keagamaan. Sejalan dengan pandangan Jan Melissen, diplomasi publik bukan sekadar penyampaian pesan, melainkan keterlibatan aktif aktor non-negara dalam membangun hubungan berkelanjutan dan membentuk persepsi positif (Melissen, 2005). Dengan demikian, OCP tidak hadir sebagai hasil tekanan, melainkan dari ekosistem diplomasi yang menciptakan legitimasi simbolik dan ketergantungan struktural Indonesia terhadap Tiongkok.

Secara struktural, kerja sama formal melibatkan Kementerian Luar Negeri RI, BKPM, dan BUMN seperti PT KAI dengan mitra Tiongkok seperti *China Development Bank* dan *China Railway Group*. Proyek-proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung, kawasan industri Morowali, dan pusat teknologi Huawei menciptakan dependensi teknis dan finansial yang membuat Indonesia lebih berhati-hati dalam isu sensitif seperti Taiwan (Zhang, 2021; Suryadinata, 2025). Dari sisi sosial, *Confucius Institute* di delapan universitas besar dan beasiswa dari *China Scholarship Council* (CSC) melibatkan ribuan mahasiswa Indonesia tiap tahun, menciptakan jejaring alumni pro-Beijing

di sektor pendidikan, birokrasi, dan media (Haid & Zhang, 2022; Xinhua, 2025).

Selain itu, TikTok dengan lebih dari 125 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia menjadi instrumen budaya digital yang memperkuat citra Tiongkok sebagai negara modern dan inovatif (DataReportal, 2024). Platform ini digunakan untuk kampanye edukasi dan budaya bekerja sama dengan kreator lokal, sehingga membentuk narasi Tiongkok yang kreatif dan tidak mengancam (Campaign Indonesia, 2025). Dalam dimensi keagamaan, program “Santri untuk Perdamaian Dunia” menunjukkan upaya Tiongkok membangun legitimasi atas kebijakan domestik di Xinjiang melalui narasi Islam moderat, dengan melibatkan santri Indonesia sebagai aktor simbolik (Haid & Zhang, 2022; Antara, 2023)

sekaligus memperkokoh legitimasi OCP di Indonesia. Strategi ini mencerminkan konsep *soft power* Joseph Nye (2004), yakni kemampuan memengaruhi negara lain melalui daya tarik, nilai, dan legitimasi.

Tabel 2. Aktor dan Mekanisme Penguatan OCP di Indonesia

Efektivitas strategi ini terlihat dari konsistensi Indonesia mendukung OCP, termasuk pernyataan resmi Menlu RI pada 2025 bahwa isu Taiwan adalah urusan domestik Tiongkok (Antara News, 2025). Selain itu, minimnya resistensi publik terhadap proyek BRI maupun lembaga Tiongkok di Indonesia menegaskan penerimaan sosial yang kuat. Dengan menciptakan ketergantungan struktural, membangun jejaring intelektual, serta memperkuat representasi budaya digital, Tiongkok berhasil meningkatkan kredibilitasnya sebagai mitra pembangunan

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa *Belt and Road Initiative* (BRI) berfungsi sebagai instrumen *soft power* strategis Tiongkok dalam memperkuat dukungan Indonesia terhadap *One China Policy* (OCP). Setelah hubungan diplomatik sempat terputus pada 1967 dan dipulihkan kembali pada 1990, peluncuran BRI pada 2013 menjadi momentum baru yang mendorong pola kerja sama bilateral ke arah yang lebih komprehensif. Melalui inisiatif ini, Tiongkok tidak hanya menawarkan investasi dan pembangunan,

tetapi juga mengintegrasikan kepentingan ekonomi Indonesia dengan agenda politik luar negeri Tiongkok, menciptakan situasi interdependensi yang saling menguntungkan namun berorientasi pada penguatan legitimasi OCP.

Implementasi BRI di Indonesia tampak melalui proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung, pengembangan kawasan industri, jaringan telekomunikasi 5G, hingga program pendidikan dan pertukaran pelajar. Proyek ini membawa manfaat berupa konektivitas, transfer teknologi, dan peningkatan SDM, sekaligus membentuk ketergantungan struktural yang memperkuat citra Tiongkok sebagai mitra strategis. Selain itu, dimensi budaya dan sosial seperti beasiswa, pelatihan, riset bersama, dan kegiatan kebudayaan mempererat hubungan masyarakat kedua negara, membangun pemahaman serta kedekatan emosional yang memperluas penerimaan publik terhadap pengaruh Tiongkok.

Dengan demikian, BRI di Indonesia tidak hanya sekadar proyek ekonomi, melainkan strategi diplomasi multidimensi yang menggabungkan pembangunan, pendidikan, dan budaya. Pendekatan ini membentuk ekosistem hubungan bilateral yang kuat, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga memastikan konsistensi dukungan terhadap *One China Policy*. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi global dapat dijadikan instrumen *soft power* yang efektif untuk mencapai tujuan politik jangka panjang Tiongkok di Asia Tenggara.

Penelitian ini memberikan tiga rekomendasi utama. Pertama, bagi pemerintah Indonesia, perlu menjaga keseimbangan antara kerja sama strategis dengan Tiongkok melalui BRI dan kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk diversifikasi mitra dagang serta peningkatan

transparansi perjanjian agar publik memahami manfaat dan risiko yang ada. Kedua, bagi akademisi dan peneliti, dibutuhkan studi lanjutan, khususnya analisis kuantitatif dan komparatif dengan negara ASEAN lain, untuk menilai dampak BRI terhadap persepsi publik dan dukungan terhadap *One China Policy*. Ketiga, bagi masyarakat, penting meningkatkan literasi geopolitik dan diplomasi agar dapat memahami implikasi kerja sama internasional secara kritis serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan agar tetap berprinsip saling menguntungkan.

Daftar Pustaka

- An, J., & Wang, Y. (2020). The Belt and Road Initiative and China's global influence: A soft power perspective. *Asian Journal of Comparative Politics*, 5(4), 350–366. <https://doi.org/10.1177/2057891120936118>
- An, J., & Wang, Y. (2020). The impact of the Belt and Road Initiative on Chinese international political influence. *Asian Journal of Comparative Politics*, 5(4), 350–366.
- Anam, S., & Ristiyani, R. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 217–236. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>
- Antara. (2020). *China increases scholarship quota to 3,000 for Indonesian students*. <https://en.antaranews.com/news/139848/china-increases-scholarship-quota-to-3000-for-indonesian-students>
- Antara. (2021). *Indonesia receives two million Sinovac doses from China*. <https://en.antaranews.com/news/190877/indonesia-receives-two-million-sinovac-doses>
- Antara. (2024). *Menko Luhut tegaskan Indonesia tetap anut One China Policy*. <https://www.antaranews.com/berita/4160238/menko-luhut-tegaskan-indonesia-tetap-anut-one-china-policy>
- ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN investment report: China's role in ASEAN economic integration*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Proyek infrastruktur dan hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok: Laporan tahunan*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Proyek strategis nasional dan perkembangan BRI di Indonesia*.
- Bappenas. (2021). *Laporan kerja sama strategis infrastruktur Indonesia–Tiongkok*.
- Belt and Road Portal. (2023). *Indonesia and the Belt and Road Initiative*.
- BKPM. (2023). *Laporan realisasi investasi triwulan IV*.

- Callahan, W. A. (2016). *China dreams: 20 visions of the future*. Oxford University Press.
- Chen, S. (2021). China's Belt and Road Initiative as soft power strategy. *Journal of Contemporary China*, 30(130), 234–251. <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1766902>
- Chen, Y. (2021). Soft power in China's foreign policy. *Journal of Contemporary Asia*, 51(4), 564–580. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1840214>
- Chen, Z. (2021). *The Belt and Road Initiative: A Chinese world order*. World Scientific Publishing.
- China Daily. (2022). *Traditional Chinese Medicine gains popularity in Southeast Asia*. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202207/21/WS62d8bebea310fd2b29e6d9b0.html>
- China–United States Joint Communiqué. (1979). U.S. Department of State.
- Chien, L. (2018). One China Policy and international relations. *Asian Political Studies Review*, 12(3), 34–45.
- Cox, R. W. (1987). *Production, power, and world order: Social forces in the making of history*. Columbia University Press.
- DataReportal. (2024). *Digital 2024 Indonesia report*. <https://datareportal.com>
- Fang, K., & Repnikova, M. (2022). Narratives of China's Belt and Road Initiative. *Journal of Chinese Political Science*, 27(1), 1–18.
- Gilpin, R. (1981). Hegemonic war and international change. *International Studies Quarterly*, 25(1), 1–21.
- Global Times. (2017). *China–Indonesia relations strengthened through BRI*.
- GoodStats. (2024). *Aplikasi paling banyak diunduh di Indonesia 2024*. <https://goodstats.id>
- GoodStats Data. (2025). *10 mobil listrik terlaris di Indonesia per Maret 2025, BYD laku keras*. <https://data.goodstats.id>
- Haid, H., & Zhang, Y. (2022). How China is using scholarships to shape Indonesian Muslim students' views. *The Conversation*. <https://theconversation.com/how-china-is-using-scholarships-to-shape-indonesian-muslim-students-views-176383>
- Herz, J. (1951). *Political realism and political idealism: A study in theory and history*. University of Chicago Press.
- Huawei Indonesia. (2024). *Seeds for the future Indonesia*. <https://www.huawei.com/id>
- Iskandar, R., Ambarwati, A., & Putra, M. I. T. (2022). Analisis strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam Belt and Road Initiative. *Jurnal Dinamika Global*, 7(1), 84–105. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i01.961>
- Jervis, R. (1978). *Perception and misperception in international politics*. Princeton University Press.
- Katadata. (2024). *BYD kuasai 36% penjualan mobil listrik di Indonesia*. <https://otomotif.katadata.co.id>
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. (2023). *The Belt and Road Initiative: Progress, contributions, and prospects*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Press statement Retno Marsudi–Wang Yi*.
- Kindleberger, C. P. (1973). *The world in depression 1929–1939*. University of California Press.
- KCIC. (2025). *Laporan operasional KCIC triwulan I 2025*.
- Kong, T. Y. (2019). The Belt and Road Initiative in Southeast Asia and responses from ASEAN countries. *China: An International Journal*, 17(4), 24–33. <https://doi.org/10.1353/chn.2019.0039>
- Kompas. (2021). *Efektivitas Sinovac pada tenaga kesehatan di Indonesia*. <https://www.kompas.com>
- Kurniawan, Y. (2018). One Belt One Road (OBOR): Agenda keamanan liberal Tiongkok? *Jurnal Politika*, 7(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v7i2.1135>
- Leong, C. K. (2017). The One China Policy and its implication for China's relation with Southeast Asia.
- Leong, H. K. (2017). Indonesia's quiet diplomacy in the South China Sea dispute.
- Li, M. (2009). *Soft power: China's emerging strategy in international politics*. Lexington Books.
- Li, M. (2009). China's rising soft power in Southeast Asia. *Journal of Asian Public Policy*, 2(3), 287–305.
- Maulana, M. F., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2016). Implikasi One China Policy terhadap hubungan luar negeri Indonesia dan Taiwan dalam perspektif hukum internasional. *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12583>
- Mahendra, Y. I., Ramadhoan, R. I., & Suhermanto, D. F. (2023). Pengaruh kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 19(2), 156–174. <https://doi.org/10.26593/jihi.v19i2.5788.156-174>
- Mearsheimer, J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W.W. Norton.
- Negara, S. D., & Suryadinata, L. (2018). *Indonesia and China's Belt and Road Initiatives: Perspectives, issues, and prospects*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Nye, J. S. (1990). *Bound to lead: The changing nature of American power*. Basic Books.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Pillsbury, M. (2015). *The hundred-year marathon: China's secret strategy to replace America as the global superpower*. Henry Holt and Co.
- Pratiwi, N., & Hidayat, A. (2021). Peran Belt and Road Initiative dalam penguatan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 112–121.
- Putri, A. R., & Ma'arif, B. (2020). Hilirisasi nikel dalam proyek Morowali.

- Putri, S. Y., & Ma'arif, D. (2020). Kerja sama ekonomi-politik Indonesia dan Cina pada implementasi program Belt and Road Initiative. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(3), 53–66. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i3.78>
- Putu Indah Savitri. (2024). Menko Luhut tegaskan Indonesia tetap anut One China Policy. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4160238/menko-luhut-tegaskan-indonesia-tetap-anut-one-china-policy>
- Rana, P. B., & Ji, X. (2020). *China's Belt and Road Initiative: Impacts on Asia and policy agenda*. Palgrave Macmillan.
- Reuters. (2021). *Indonesia turns to China for bulk of COVID-19 vaccine needs*. <https://www.reuters.com>
- Reuters. (2025). *China's BYD to complete \$1 billion Indonesia plant by end-2025*. <https://www.reuters.com>
- Saraswati, N. M. V. (2020). Menilik perjanjian Indonesia–Cina dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 55–72. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.72>
- SCIO. (2025). *China's Confucius Institutes active in Southeast Asia*. <http://english.scio.gov.cn>
- Setiawan, D., & Wibowo, E. (2022). The political economy of Indonesia–China relations: The impact of the Belt and Road Initiative. *Indonesian Journal of International Relations*, 18(1), 47–68.
- Shambaugh, D. (2013). *China's grand strategy: A global history*. Oxford University Press.
- SMRC. (2022). *Laporan persepsi publik terhadap negara asing selama pandemi*. <https://smrc.co.id>
- Storey, I. (2017). Indonesia and Taiwan in the shadow of China. *ISEAS Perspective*.
- Suryadinata, L. (2017). *The rise of China and the Chinese overseas*. ISEAS.
- Sutter, R. (2018). *Foreign relations of the PRC: The legacies and constraints of China's international politics*. Rowman & Littlefield.
- Taiwan Ministry of Education. (2021). *Taiwan scholarship program*.
- Taiwan News. (2021). *Indonesia restricts Taiwan office activities*.
- Taiwan Relations Act. (1979). U.S. Congress.
- TAITRA. (2013). *Indonesia–Taiwan economic report*.
- Tukan, E. (2024). One China Policy dan dampaknya bagi hubungan Indonesia–Taiwan. *Lex Prudentium Law Journal*.
- Waltz, K. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.
- Wang, J. (2019). The One China Policy: Concepts, practices, and implications. *Asian Perspective*, 43(2), 173–196.
- Xinhua. (2021). *Indonesia–China health cooperation amid COVID-19*.
- Xinhua. (2023). *China–Indonesia HSR cooperation success story*.
- Zhang, L. (2021). BRI and the political economy of Chinese soft power. *Asian Perspective*, 45(2), 163–187.
- Zhang, Y. (2021). The Belt and Road Initiative and Chinese soft power. *Journal of Chinese Political Science*, 26(2), 255–273.
- Zhang, Y. (2021). BRI and the future of Chinese diplomacy. *China Review*, 21(3), 1–23.
- Zhao, S. (2019). Confucius Institutes and China's soft power strategy under the Belt and Road Initiative. *Asian Education and Development Studies*, 8(1), 19–33.